



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/40/M.AA.05/2021
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
2020

31 Maret 2021

YTH. MENTERI AGAMA
DI
JAKARTA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kementerian Agama. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk **menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*)** serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kementerian Agama Tahun 2020 memperoleh nilai **71,85** atau predikat **BB**. **Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang baik jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya.** Hal ini disebabkan pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kementerian Agama sudah mulai berjalan dengan baik namun perlu dilakukan beberapa perbaikan lebih lanjut. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut berikut:

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2019	2020
a.	Perencanaan Kinerja	30	22,23	22,36
b.	Pengukuran Kinerja	25	17,04	17,23
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,23	11,32
d.	Evaluasi Internal	10	7,27	7,40
e.	Capaian Kinerja	20	12,75	13,54
	Nilai Hasil Evaluasi	100	70,52	71,85
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Uraian singkat selengkapnya hasil evaluasi adalah sebagai berikut:



1. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan manajemen kinerja sektor publik di lingkungan Kementerian Agama telah dilakukan dengan baik. Secara formal penerapan tersebut telah dilakukan sampai ke unit kerja terkecil dengan menyusun dokumen perencanaan kinerja, merumuskan indikator kinerja, menyusun laporan kinerja dan telah melakukan evaluasi kinerja internal;
2. Kementerian Agama dan unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Agama telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Renstra tersebut disusun sesuai dengan jenjangnya, namun belum seluruh ukuran kinerja telah berorientasi hasil;
3. Kementerian Agama belum menyusun pohon kinerja yang memetakan kinerja dan kegiatan utama dalam pencapaian kinerja organisasi;
4. Unit kerja di lingkungan Kementerian Agama telah menyusun laporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas kinerjanya. Laporan kinerja tersebut sudah dilengkapi dengan analisa pencapaian kinerja namun belum sepenuhnya mampu menjelaskan cara mencapai kinerja serta memberi masukan perbaikan perencanaan.

Berdasarkan kondisi di atas, implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Agama telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Agar penerapan manajemen kinerja dan budaya kinerja lebih efektif, maka kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan reviu terhadap ukuran kinerja yang ada terutama untuk indikator pada unit kerja sehingga dapat mengukur kinerja dengan lebih baik;
2. Menyusun pohon kinerja yang dapat digunakan untuk memetakan kinerja dan kegiatan utama dalam pencapaian kinerja organisasi dan memastikan terdistribusi ke seluruh organisasi;
3. Terus meningkatkan kualitas evaluasi internal di lingkungan Kementerian Agama sehingga hasil evaluasi internal dapat memberikan umpan balik untuk meningkatkan kualitas perencanaan atau pelaksanaan kegiatan;
4. Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada unit kerja tingkat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Agama agar dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya;
5. Terus melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Agama secara berkala sehingga internalisasi budaya kinerja semakin meningkat.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam menerapkan SAKIP di lingkungan Kementerian Agama.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,**

TJAHJO KUMOLO

Tembusan:
Wakil Presiden Republik Indonesia